



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini *public relations* sudah menjadi komponen yang sangat penting bagi perusahaan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebutuhan terhadap *public relations* yaitu untuk membangun citra yang positif perusahaan dimata publik.

Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya yang berjudul *Effective Public Relations* mengatakan bahwa,

“Public relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial relationship between an organization and the public on whom its success or failure depend” (Cutlip, Center, dan Broom, 2002, h. 6)

(Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya sebagai penentu kesuksesan dan kegagalan organisasi)

Humas pemerintah sering dianggap negatif oleh masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Komunikasi dan Kementrian Kominfo, Gatot Dewa Brata kepada Republika dimana stigma negatif tersebut diantaranya humas lambat melakukan respon, cenderung birokratis dalam pengambilan keputusan, cenderung terpaku pada jam kerja untuk merespon, cenderung mengelak pada kebenaran dari suatu isu yang diberitakan dan mudah melempar tanggung jawab dalam merespon. (Sumber : Republika)

Stigma negatif selanjutnya yang melekat adalah humas pemerintah merasa aman untuk bersikap *no comment* atau *off the records*, kurang *fight* menghadapi dan menjadi narasumber dalam dialog interaktif, dan cukup puas hanya dengan acara *blocking time* dan *advertorial*. Gatot menyebut bahwa humas pemerintah terkadang malas untuk *re-charging* pengetahuan dan informasi aktual, kurang berupaya memperluas jaringan internal maupun eksternal dan sering berdalih kurang intensif karena terkait keterbatasan anggaran. (Sumber : Republika)

Public relations memang sudah menjadi bagian penting suatu perusahaan untuk membantu perusahaan dalam membangun *image* dan reputasi. Namun, banyak yang mengidentifikasi bahwa *public relations* hanya terdapat di perusahaan-perusahaan swasta padahal lembaga maupun instansi pemerintah pun memiliki *public relations*, di lembaga atau instansi pemerintah *public relations* di kenal dengan nama humas.

Public relations lebih identik dengan perusahaan-perusahaan swasta karena pada realitasnya kinerja *public relations* di swasta lebih terlihat dan cukup menonjol. Sedangkan humas yang berada di lembaga pemerintah terbilang kinerjanya tidak proaktif seperti pada perusahaan-perusahaan swasta, *public relations* (humas) di lembaga pemerintah ini kinerjanya dapat dikatakan lebih reaktif, karena humas berperan sebagai pemberi atau penyampai informasi kepada publik lembaga terkait, untuk memberi informasi terhadap publik pun harus melalui birokrasi yang berbelit dan berdasarkan keputusan atasan lembaga tersebut, sehingga membuat lingkup humas menjadi terbatas.

Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai akibat dari tuntutan zaman, humas harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan informasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif.

Humas pemerintah juga harus mampu bersinergi atau bermitra dengan wartawan, serta lembaga pers lainnya dalam membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi program pembangunan kepada masyarakat.

Di era keterbukaan informasi publik ini, sudah saatnya peran humas pemerintah dioptimalkan. Berbagai permasalahan yang membelit humas pemerintah harus diurai. Humas harus berperan sebagai juru bicara yang efektif bagi pemerintah. Peran strategis ini harus dimanfaatkan untuk membangun opini yang baik di tangan masyarakat tentang pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah. Humas harus mampu membentuk dan mengarahkan opini publik kepada citra positif pemerintah.

1.2 Tujuan Kerja Magang

Program kerja magang merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa karena dengan adanya kerja magang ini mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama kuliah untuk langsung diterapkan di lapangan.

Dengan mengikuti kerja magang ini, tujuan penulis adalah :

1. Mengetahui cara kerja humas di Pemerintahan Kota Tangerang.
2. Mengetahui Tangerang yang mempunyai konsep sebagai “*Smart City*”

Dengan mengikuti kerja magang ini penulis juga mengetahui dinamika dan perkembangan dunia kerja sehingga jika kerja kelak penulis dapat cepat beradaptasi.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan

Penulis mengikuti praktik kerja magang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang terhitung mulai dari tanggal 5 April 2016 sampai dengan 5 Juni 2016 sebagai asisten humas yang bertugas membantu dalam melaksanakan tugas.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan Kerja Magang yang penulis lakukan sebagai berikut. Senin, 14 Maret 2016 penulis meminta surat pengantar magang kepada sekretaris ketua program studi Ilmu Komunikasi yang penulis ajukan untuk Divisi Humas Pemerintah Kota Tangerang.

Rabu, 17 Maret 2016 penulis mengambil surat pengantar magang tersebut dan mengirimkan via titipan kilat (JNE) ke bagian humas terlebih dahulu dan di hari

Senin, 21 Maret 2016 penulis mendapatkan email dari Humas Pemkot untuk mengikuti prosedur kerja magang.

Di hari Kamis, 31 Maret 2016 penulis mengantarkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Jl. Nyimas Melati No. 21 A. Penulis memberikan fotokopi KTP dan juga fotokopi KTM beserta dengan surat pengantar magang fotokopi.

Penulis diharapkan untuk datang pada hari Senin, 4 April 2016 mengambil surat rekomendasi yaitu menyatakan kalau penulis diterima kerja magang di Humas Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dari Kesbangpol, namun tidak jadi karena yang menandatangani tidak hadir dikarenakan rapat. Kemudian, penulis diminta datang keesokan harinya lagi untuk mengambil surat rekomendasi tersebut.

Selasa, 5 April 2016 penulis datang kembali dan mendapatkan surat rekomendasi tersebut dan di hari yang sama penulis langsung mendatangi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan dibawa ke bagian Humas untuk memberikan surat rekomendasi tersebut.

Setibanya di ruangan Humas, penulis bertemu dengan Mualim yang merupakan Sub Bagian Pemberitaan dan Analisis Media. Setelah itu, Mualim menanyakan apakah penulis masuk hari itu juga atau keesokan harinya. Namun penulis meminta untuk hari itu juga bisa bekerja di bagian Humas. Setelah Mualim mengambil surat rekomendasi tersebut, penulis dapat bekerja di sana.